

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENATAAN AKSES  
REFORMA AGRARIA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN**

(Studi Di Kelurahan Setapuk Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**ELLY SULANDARI**

**NIT. 21303730**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2025**

## **ABSTRAK**

*This research is driven by the urgent issues faced by coastal communities in Setapuk Besar Village due to seawater intrusion, which are then addressed through empowerment and the arrangement of agrarian reform access for welfare improvement. Using a descriptive qualitative approach, this study aims to describe the socio-economic conditions and obstacles faced by the community, as well as to examine the results of this empowerment within the context of agrarian reform access arrangement. The research findings indicate that the program successfully provided assistance, skills training (e.g., BSM3 fertilizer production), production house support, and export certification, which significantly improved access to land, business capital, and community welfare, fostering independence and sustainability. In conclusion, the arrangement of agrarian reform access through coastal community empowerment has been effective in improving welfare and quality of life in Setapuk Besar Village, while also serving as a solution to seawater intrusion.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
INTISARI .....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoritis .....	17
1. Reforma Agraria.....	17
2. Penataan Akses.....	19
3. Pemberdayaan Masyarakat.....	24

4. Masyarakat Pesisir.....	30
5. Kesejahteraan Masyarakat.....	30
C. Kerangka pemikiran .....	34
D. Pertanyaan Penelitian .....	38
BAB III METODE PENELITIAN .....	37
A. Format Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Penetapan dan Jumlah Informan .....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
1. Wawancara.....	42
2. Observasi.....	43
3. Dokumentasi.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum Kota Singkawang.....	50
B. Profil Kelurahan Setapuk Besar .....	52
1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	52
2. Bidang Pertanahan.....	54
3. Potensi dan Kerentanan Kelurahan Setapuk Besar .....	55
BAB V PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR... .....	59
A. Tahapan Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Pemberdayaan Masyarakat .....	59
1. Penetapan Lokasi.....	63
2. Tahapan Penyuluhan .....	63

3. Tahapan Pemetaan Sosial.....	65
4. Tahapan Penyusunan Model .....	70
5. Tahapan Penyusunan Data .....	72
 B. Metode Penataan Akses yang Dipadukan Dengan Pemberdayaan Masyarakat .....	73
1. Keterlibatan Masyarakat .....	74
2. Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan .....	74
3. Implementasi di Lapangan .....	75
4. Lebih Sedikit Konflik Sosial .....	76
5. Kualitas Hidup yang Lebih Baik.....	76
6. Keberlanjutan Program .....	77
7. Peningkatan Akses Sumber Daya .....	77
8. Evaluasi dan Umpam Balik.....	77
9. Peningkatan Kerja Sama Pemangku Kepentingan.....	78
 C. Hubungan Antara Penataan Akses Reforma Agraria dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat .....	78
1. Perluasan Akses Lahan dan Kepastian Hukum.....	78
2. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Diversifikasi Usaha .....	79
3. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dan Kualitas Hidup.....	80
4. Pengurangan Kemiskinan dan Penguatan Kemandirian Sosial Ekonomi .....	81
 D. Bentuk Dukungan yang Diberikan Oleh Pemerintah.....	87
1. Kantor Pertanahan Kota Singkawang .....	87
2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang .....	88

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Singkawang .....	90
E. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penataan Akses Reforma Agraria .	92
F. Penanganan Kendala Penataan Akses Reforma Agraria.....	93
1. Kepercayaan Masyarakat .....	93
2. Terbatasnya Pupuk Subsidi .....	94
3. Banyak Data Penerima Pupuk yang Tidak Sesuai .....	95
G. Efektivitas Penerapan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir .....	95
<b>BAB VI HASIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....</b>	<b>97</b>
A. Akses Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat Pesisir dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi.....	97
1. Perluasan Akses Lahan.....	97
2. Peningkatan Hasil Pertanian.....	98
3. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dan Pendapatan.....	99
4. Pengurangan Kemiskinan.....	100
B. Perubahan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir Setelah Implementasi Pemberdayaan .....	101
1. Keberlanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Input Produksi .....	101
2. Keberlanjutan Melalui Pengembangan Rumah Produksi.....	102
3. Keberlanjutan Melalui Akses Pasar yang Diperluas .....	102
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>121</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Program Reforma Agraria merupakan salah satu komponen penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di sektor pertanahan. Kemudian digulirkan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan utama. Selain itu, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa negara pada hakikatnya menguasai bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Reforma agraria memiliki dua pilar utama yang harus seimbang: penataan aset melalui sertifikat tanah untuk memberikan kepastian hukum dan akses ke lembaga keuangan, serta penanganan akses untuk memperluas akses masyarakat terhadap tanah produktif dan mengurangi ketimpangan distribusi dengan prinsip partisipasi, keberlanjutan, dan keadilan. Keseimbangan kedua pilar ini penting untuk mencapai tujuan reforma agraria dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pengelolaan tanah yang efisien, transparan, dan inklusif dengan memperhatikan keberlanjutan jangka Panjang. (Nurahmani, 2023b). Pengelolaan akses merupakan bagian penting reforma agraria yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola lahan secara efektif dengan meningkatkan kapasitas pemanfaatan sumber daya melalui akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar, sehingga lahan dapat dimanfaatkan sebagai aset

ekonomi bernilai tinggi untuk meningkatkan sumber daya finansial masyarakat (Surya Wira et al., 2024).

Pemberdayaan masyarakat menjadi pilihan karena memberikan dampak sosial yang lebih luas, seperti pengurangan ketimpangan sosial, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam reforma agraria (Harashta & Mazlan, 2022). Pengelolaan akses dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan potensi lokal setiap daerah, karena setiap wilayah memiliki kualitas dan potensi unik seperti kekayaan sumber daya alam atau potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan. Program ini difokuskan sesuai karakteristik daerah, misalnya peningkatan kemampuan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk daerah yang kaya sumber daya, atau peningkatan akses pasar untuk wilayah dengan potensi pasar yang belum terealisasi, sehingga mendorong kemajuan ekonomi lokal. (Dini Riyadi & Nazir Salim, 2020).

Kegiatan penanganan akses reforma agraria Kantor Pertanahan Kota Singkawang berada di Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Kelurahan Setapuk Besar adalah Kelurahan yang berada di pesisir utara di Kecamatan Singkawang Utara yang berperan penting dalam proses pembangunan Kota Singkawang. Kelurahan ini memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan mendukung pembangunan Pemerintah Kota Singkawang karena lokasinya yang strategis. Keberhasilan perencanaan pemberdayaan yang tepat sasaran diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan terkait calon subyek reforma agraria, yaitu pada Kelurahan Setapuk Besar melalui pemetaan sosial. Pemetaan sosial adalah proses pengumpulan dan penggambaran data, informasi, potensi, kebutuhan, dan permasalahan sosial, ekonomi, teknis serta kelembagaan untuk mengenali dan mendalamai kondisi masyarakat. Pemetaan sosial penting untuk mengidentifikasi dan memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya (sistem kelembagaan dan individu)

(Arnowo, 2025a). Hasil dari pemetaan sosial menyatakan bahwa Kelurahan Setapuk Besar memerlukan pengembangan melalui pemberdayaan tanah masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan yang diperlukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemodal dan usaha, manajemen pengembangan produk dan pemasaran.

Penelitian di Kelurahan Setapuk Besar berfokus pada urgensi permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat dampak air laut. Upaya utama yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan untuk menangani situasi tersebut, sekaligus mempertahankan serta mengembangkan potensi yang sudah ada. Produk utama yang dimiliki adalah kelapa, ubi, dan talas, dan termasuk juga usaha tambahan di pekarangan rumah yaitu cabai. Meskipun memiliki banyak potensi sumber daya alam, sektor pertaniannya menghadapi sejumlah masalah besar yang menghambat produktivitasnya. Infrastruktur irigasi yang tidak memadai merupakan salah satu masalah utama. Irigasi yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan air pertanian saat cuaca ekstrem terjadi, seperti musim kemarau panjang atau hujan lebat. Akibatnya, produktivitas pertanian terganggu, dan petani menghadapi tantangan untuk mengelola lahan dengan cara yang paling efektif.

Mayoritas masyarakat Kelurahan Setapuk Besar mengandalkan pertanian turun-temurun dan UMKM seperti usaha keripik serta ayam potong, namun menghadapi tantangan serius akibat intrusi air laut yang menurunkan kesuburan tanah dan kualitas bahan baku, sehingga memaksa petani berpindah-pindah mencari lahan subur dan menyebabkan ketidakstabilan. Para pelaku UMKM meskipun tergabung dalam kelompok usaha dan memiliki izin PIRT, kesulitan meningkatkan penjualan karena minimnya pasar lokal sehingga mengandalkan ekspor ke Malaysia, namun terhambat karena sebagian besar tidak memiliki sertifikat resmi dan harus meminjam dari pihak lain, ditambah masalah penjualan ilegal dimana produk keripik dijual kembali dengan label Malaysia di Indonesia dengan harga lebih tinggi sehingga pelaku UMKM kehilangan kontrol akan hal tersebut.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir serta hambatan yang dihadapi dalam mengelola usaha dan lahan pertanian. Fokus penelitian difokuskan pada Kelurahan Setapuk Besar, yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, seperti kelapa, ubi, dan talas, serta UMKM, seperti keripik dan ayam potong. Dengan memahami kondisi, tantangan, dan peluang yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan masyarakat dan mendukung upaya pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Penelitian ini disusun dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penataan Akses Reforma Agraria untuk Peningkatan Kesejahteraan (Studi di Kelurahan Setapuk Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat).”

## B. Rumusan Masalah

Kelurahan Setapuk Besar, yang terletak di Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, memiliki potensi yang signifikan dalam bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk usaha keripik dan ayam potong, serta sektor pertanian yang menghasilkan talas, kelapa, dan ubi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat yang efektif sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagian besar penduduk Kelurahan Setapuk Besar bergantung pada sektor pertanian dan UMKM yang mereka jalankan. Sebagai bagian dari program reforma agraria, Kantor Pertanahan Kota Singkawang telah membentuk Tim Akses Reforma Agraria yang akan beroperasi di Kelurahan Setapuk Besar pada tahun 2023. Tim ini telah berfokus pada peningkatan akses reforma agraria dengan memperhatikan potensi wilayah dan masyarakat setempat. Karena fakta bahwa setiap wilayah memiliki kesulitan, dan karakteristik yang berbeda, program reforma agraria perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi yang berbeda, termasuk sumber daya alam, potensi ekonomi, struktur sosial, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah.

Berdasarkan uraian masalah yang telah disampaikan, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penataan akses reforma agraria di Kelurahan Setapuk Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kelurahan Setapuk Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk:

1. Mengetahui pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penataan akses reforma agraria untuk peningkatan kesejahteraan.
2. Mengetahui hasil dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat akademis, yaitu bagi peneliti studi ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang implementasi reforma agraria berbasis pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir dengan fokus pada sektor pertanian dan UMKM, sekaligus mengembangkan wawasan teoritis dan memperkaya referensi untuk studi lanjutan dalam bidang pertanian, ekonomi lokal, dan kebijakan agraria. Bagi Kampus STPN, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran, khususnya dalam ranah kebijakan agraria dan pemberdayaan masyarakat, serta menyediakan contoh kasus nyata dalam kajian kualitatif deskriptif yang memungkinkan taruna dan civitas akademika memahami secara mendalam tantangan dan peluang implementasi reforma agraria pada level lokal.

## 2. Manfaat Sosial Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat sosial dan praktis yang bersifat multilevel. Bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program reforma agraria berbasis pemberdayaan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya agraria secara produktif dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hak atas tanah dan strategi pemanfaatannya, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam pengelolaan lahan, baik untuk pertanian maupun pengembangan UMKM, sehingga dapat memperluas peluang ekonomi lokal.

Bagi peneliti, kajian ini menjadi sarana untuk memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis implementasi reforma agraria di tingkat lokal serta menghasilkan data lapangan yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan metode pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan relevan. Sementara itu, bagi pemerintah, penelitian ini menyediakan informasi komprehensif terkait kondisi tanah, sosial, ekonomi, dan fisik masyarakat di Kelurahan Setapuk Besar yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan agraria yang lebih tepat sasaran, strategi peningkatan kesejahteraan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan produktivitas lahan dan pencegahan konflik agraria.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi dalam menciptakan sinergi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Proses pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Setapuk Besar melalui penataan akses reforma agraria yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang selama periode Maret hingga Juli 2023 menunjukkan hasil yang baik di setiap tahapannya. Kegiatan ini meliputi penetapan lokasi, penyuluhan, pemetaan sosial, penyusunan model, dan pendampingan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan akses tanah dan sumber daya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Penataan akses reforma agraria berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Setapuk Besar dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, mulai dari pemetaan sosial, penyuluhan, penyusunan model, hingga pendampingan dan pembentukan rumah produksi. Program ini menyediakan pelatihan, fasilitasi akses pasar, pendampingan teknis, serta penguatan kelompok usaha, dengan dukungan partisipasi masyarakat yang tinggi. Meskipun menghadapi tantangan seperti intrusi air laut dan minimnya infrastruktur irigasi, metode penataan akses melalui pengembangan Pertanian Terintegrasi berhasil memanfaatkan lahan secara produktif, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka akses ekonomi baru. Keberhasilan tersebut didukung oleh interaksi aktif antar pihak, yaitu masyarakat, Kantor Pertanahan, serta dinas teknis terkait yang berkolaborasi dalam menciptakan program yang partisipatif dan berkelanjutan.
2. Pemberdayaan melalui penataan akses berhasil meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang pertanian dan UMKM, menciptakan diversifikasi usaha dan peluang pendapatan baru. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan rumah produksi dan diversifikasi usaha, yang memungkinkan masyarakat memperoleh penghasilan dari produk secara

lebih stabil dan terorganisasi. Upaya ini juga mengurangi kemiskinan dengan memberikan pelatihan pembuatan pupuk BSM3, penyediaan sertifikat ekspor, serta peningkatan akses pasar, sehingga masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Masyarakat menjadi lebih mandiri dengan pendapatan meningkat serta ketahanan sosial dan ekonomi yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, program penataan akses reforma agraria di Kelurahan Setapuk Besar telah memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam penguatan sosial dan lingkungan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan dan partisipasi dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi strategis telah dibuat untuk memaksimalkan pelaksanaan dan keberlanjutan program penataan akses di Kelurahan Setapuk Besar:

1. Bagi Pemerintah, untuk mengatasi masalah intrusi air laut yang berkelanjutan dibutukan perhatian lebih lanjut seperti memasang sea wall untuk mencegah intrusi air laut ke wilayah daratan pada saat banjir rob atau ketika gelombang tinggi karena pohon bakau yang ada juga kurang memadai untuk menahan intrusi air laut. Efek dari intrusi air laut setiap tahunnya naik dan jika dibiarkan akan berdampak lebih besar lagi, oleh karena itu pemerintah harus membuat rencana tindak lanjut. Strategi ini harus dikembangkan oleh tim multisektor yang bekerja sama, dengan penekanan pada peningkatan sistem koordinasi.
2. Bagi Masyarakat, teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat untuk meningkatkan ketersediaan informasi mempromosikan produk daerah, dan memperluas pasar produk pertanian agar tidak hanya memiliki target pasar yang sempit hanya disekitar daerah rumah produksi. Agar masyarakat dapat bersaing di era digital dan memperoleh keuntungan finansial yang baik kedepannya, pemerintah dan lembaga terkait juga harus menawarkan program pelatihan terpadu yang mencakup pemasaran digital.

3. Bagi pelaku UMKM dan kelompok tani di Kelurahan Setapuk Besar diharapkan semakin kreatif dan kooperatif. Perlu terus dikembangkan untuk menciptakan jaringan kemitraan strategis, meningkatkan standar kualitas produksi, dan menghasilkan produk pertanian bernilai tambah tinggi. Untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas program dalam jangka Panjang. Seperti pelatihan, dukungan teknis, dan pembangunan kelembagaan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama.
4. Bagi penelitian selanjutnya dengan karakteristik Kelurahan Setapuk Besar sebagai wilayah pesisir, penelitian ke depan dapat membandingkan efektivitas implementasi reforma agraria di beberapa wilayah pesisir lainnya. Hal ini akan memperkaya pemahaman tentang faktor keberhasilan dan tantangan lokal dalam pemberdayaan masyarakat melalui penataan akses reforma agraria.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Z. (2022). Implementasi Perpres 86/2018 Tentang Reforma Agraria Di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (Jiap)*, 8(3), 276–281.
- Amalia, S. (2022). Implementasi Access Reform Pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5).
- Ariawan, W. (2023). Analisis Keuntungan Integrated Farming System Pada Usahatani Padi Pedesaan. *Journal Of Agrosociology And Sustainability Jassu*, 1(1). <Https://Doi.Org/10.61511/Jassu.V1i1>
- Arnowo, H. (2025a). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria Di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. *Tunas Agraria*, 8(1), 113–128. <Https://Doi.Org/10.31292/Jta.V8i1.408>
- Arnowo, H. (2025b). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria Di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. *Tunas Agraria*, 8(1), 113–128. <Https://Doi.Org/10.31292/Jta.V8i1.408>
- Ayu Wulandari, D., & Syafii. (2022). Peluang, Tantangan, Dan Strategi Pemanfaatan Potensi Lokal Kabupaten Kendal Dalam Pembelajaran Seni Rupa. *Eduarts*, 11(1). <Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Eduart>
- Chadijah, S., Kusumo Wardhani, D., Imron, A., Kencana No, S., & Selatan, T. (2020). Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung \*. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1). <Https://Doi.Org/10.3376/Jch.V6i1.286>
- Cook, K. S., Cheshire, C., Rice, E. R. W., & Nakagawa, S. (2013). *Social Exchange Theory*. In Handbooks Of Sociology And Social Research. [Https://Doi.Org/10.1007/978-94-007-6772-0\\_3](Https://Doi.Org/10.1007/978-94-007-6772-0_3)

- Dini Riyadi, A., & Nazir Salim, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(2).
- Fajri, I., Pujiriyani, D. W., & Christine, R. V. (2024). Reforma Agraria Perkotaan: Dampak Penanganan Akses Terhadap Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng, Kota Surakarta, Jawa Tengah. *Temali : Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 229–244. <Https://Doi.Org/10.15575/Jt.V7i2.32458>
- Fajrie, M. (2018). Gaya Komunikasi Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah. *Inject (Interdisciplinary Journal Of Communication)*, 2(1). <Https://Doi.Org/10.18326/Inject.V2i1.53-76>
- Ferian Fajar, H., Syahputra, J., & Ningsih, M. P. N. A. (2022). Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Agrarian Reform Policy Strategy In Realizing The Welfare Of A Social Justice Community Based On The Constitution. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9). <Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>
- Ferian Fajar, H., Syahputra, J., & Puri Nur Ayu Ningsih, M. (2022). Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Agrarian Reform Policy Strategy In Realizing The Welfare Of A Social Justice Community Based On The Constitution. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 758–775.
- Fitria, A. D., Khetri, A. C., Salwa, F., Haridani, H., Manik, H. F., Khairani, K., Dasopang, L. M., Lestari, N., Rahmawati, N., Sagala, S. S., & Arika, R. (2023). Perilaku Dan Sikap Karakteristik Serta Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Dusun XIV Desa Percut. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <Https://Doi.Org/10.47467/Elmujtama.V4i2.4542>
- Harashta, A., & Mazlan. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Legalisasi Aset Pertanahan Di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*.
- Hasan, M., Tuti Khairani Harahap, Mp., Syahrial Hasibuan, Ms., Iesyah Rodliyah, M., Sitti Zuhaerah Thalhah, Mp., Cecep Ucu Rakhman, Mp., Paskalina Widiastuti

Ratnaningsih, M., Inanna, Mh., Andi Aris Mattunruang, Mp. S., Nursaeni, Mp., Yusriani, Mp., Nahriana, Mk., Dumaris Silalahi, Mp. E., Dra Sitti Hajerah Hasyim, Mp., Azwar Rahmat, Ms., Yetty Faridatul Ulfah, Mtp., & Nur Arisah, Mh. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahtah Media Grub.

Herlon, M., Ridho, Z., & Sri Rahayu, W. (2023). Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kepemilikan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Jurnal Agribisnis*, 25(1), 109–122. <Https://Doi.Org/10.31849/Agr.V25i1.16351>

Hutri Sinaga, E., Massardy, E., Yulianto, T., Massardy, E., Agraria Dan Tata Ruang, K., Pertanahan Nasional, B., Pertanahan Kota Cilegon, K., Banten, P., Wilayah Provinsi Banten, K., Pertanahan Kab Serang, K., & Koresponden, I. (N.D.). *Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Penanganan Akses Reforma Agraria Di Desa Tengkurak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Penanganan Akses Reforma Agraria Di Desa Tengkurak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Fisheries Business Development Through Agrarian Reform Access Management In Tengkurak Village, Serang Regency, Banten Province*.

Kartika, D. (2017). *Catatan Akhir Tahun 2017 Konsorsium Pembaruan Agraria* (2017th Ed.). Konsorium Pembaruan Agraria.

Khosiah, Hajrah, & Syafril. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *Jisip*, 1(2).

Luthfi Rohman -, M., Pembimbing, D., & Puji Astuti, D. (N.D.). *Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*.

Makagingge, M. H., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2017). Pemberdaan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

- Mansur, A., Andika, R., Megana, P. Tu., Grafiky, A. F., & Sufiarina. (2025). Implementasi Teori Hukum Dalam Reformasi Hukum Agraria Di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 33–39. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62383/Presidensial.V2i1.439>
- Marfiani, T., Hartoyo, S., & Manuwoto. (2009). Analisis Potensi Ekonomi Dan Strategi Pembangunan Ekonomi Di Bogor Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 1(1).
- Medaline, O., Nadirah, I., & Syukran Yamin Lubis, M. (2023). “Agrarian Reform Village” Pematang Johar Village: Access To Reform To Realize Land-Based Community Empowerment. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 14(3). <Https://Doi.Org/10.26905/Idjch.V14i3.11309>
- Naufal, Y. A., Rifki, M., Ramadhan, A., Naufal, B., Wahanisa, R., Adymas, M., Fikri, H., & Naufal, A. (2025). Pengaruh Reforma Agraria Terhadap Dinamika Pembangunan Ekonomi Lokal Di Indonesia. *Journal Of Multidisciplinary Inquiry In Science Technology And Educational Research*, 2(1), 184–190. <Https://Doi.Org/10.32672/Mister.V2i1.2394>
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Putu, N., Dewi, S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Raden, I., Anggraini, R. P., Mamengko, S., Fathin, M., Septian, R., Mola, A. A., & Syaifudin, F. W. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Widina Media Utama.
- Nugroho, A. (2023). Community Business Action Plan Based On Regional Potential In The Framework Of Agrarian Reform. *Interdisciplinary Journal And Humanity (Injury)*, 2(4). <Https://Doi.Org/10.58631/Injury.V2i4.64>
- Nurahmani, A. (2023a). Revitalisasi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Rangka Penguatan Hak Perekonomian Rakyat. *Majalah Hukum Nasional*, 53(2). <Https://Doi.Org/10.33331/Mhn.V53i2.236>
- Nurahmani, A. (2023b). Revitalisasi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Rangka Penguatan Hak Perekonomian Rakyat (Revitalization Of Agrarian Reform

Policies In The Framework Of Strengthening People's Economic Rights). *Majalah Hukum Nasional*, 53. <Https://Doi.Org/10.33331/Mhn.V53i2.236>

Nurrohim, A., Bs, T., & Setyaningsih, W. (2012). Kajian Intrusi Air Laut Di Kawasan Pesisir Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Geo Image*, 1(1). <Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Geoimage>

Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat. (2023). Buletin Iklim Kalimantan Barat edisi Februari 2023: Analisis Iklim Januari 2023 dan Prakiraan Iklim Maret–Mei 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). <http://iklim.kalbar.bmkg.go.id>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Cv.

Rappaport, J. (1981). In Praise Of Paradox: A Social Policy Of Empowerment Over Prevention. *American Journal Of Community Psychology*, 9(1). <Https://Doi.Org/10.1007/Bf00896357>

Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.

Sahria, Y. Y., & Eko Bawono, S. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemetaan Dan Optimaliasi Potensi Desa Wisata Segajih Live In Education Kulon Progo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 6(3), 264–278. <Https://Doi.Org/10.36341/Jpm.V6i3.3228>

Sandy Harland, J., Didi, L., Abidin, Z., & Kredit Usaha Tani Di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, P. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Petani Penerima Sertifikat Tanah Melalui Empowerment Of Farming Communities Recipients Of Land Certificates Through The Farming Business Credit Program In Lasalimu District, Buton Regency Informasi Artikel Abstrak*. <Https://Ejournal.Lppmunidayan.Ac.Id/Index.Php/Administratio/>

Sastrawan, B., Samsi, A., & Goris Seran, G. (2024). *Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat* (Vol. 3, Issue 1).

- Silalahi, E. R. (2024). Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Terhadap Dampak Perubahan Iklim. *Jurnal Kajian Ruang*, 4(2).
- Sizi, B. R. C., Munir, U., & Imawanto. (2023). Kebijakan Reforma Agraria Yang Berkeadilan. *Unizarlawreview*, 6(2). <Https://Doi.Org/10.36679/Ulr.V6i2.57>
- Surya Wira, Arya Salman, Abimanyu Aziz, Rofi Wahanisa, & Muhammad Adymas. (2024). Reforma Agraria Dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Desa. *Journal Customary Law*, 2(1). <Https://Doi.Org/10.47134/Jcl.V2i1.3376>
- Suryani, N., Jailani, Ms., & Suriani, N. (2023). Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*. <Http://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Ihsan>
- Venita Sary, D., Rahman, K., Prayuda, R., & Sundari, R. (2021). Identifikasi Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *Sosial Informa*, 7(02).
- Wahita Putri, A., Suharto, B., & Dewi Susanawati, L. (2015). Identifikasi Pencemaran Air Tanah Akibat Intrusi Air Laut (Studi Kasus Pesisir Pantai Ketah Kabupaten Situbondo). *Jurnal Suberdaya Alam Dan Lingkungan*, 2(3).
- Wahyuningsih, S., Haviana, E., Pratiwi, I. W., Utomo, B., & Ramdhani, R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Kegiatan Kesadaran Melek Berwirausaha. *Community Development Journal*, 5(3), 4579–4586.
- Warih Minarni, E., Sri Utami, D., & Prihatiningsih, N. (2017). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Dengan Budidaya Sayuran Organik Dataran Rendah Berbasis Kearifan Lokal Dan Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2).
- Waruwu, M. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. 7(1).

Waruwu, M. (20231). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.

Wibowo, F. S., Hendro Wibowo, G. D., & Dwi Putro, W. (2022). Implementasi Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Accsess Reform. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2027. <Https://Doi.Org/10.24843/Ks.2022.V10.I09.P06>

Wiwik, & Ma'ruf, M. F. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pantai Di Kabupaten Tuban (Studi Kasus Di Desa Gadon, Kecamatan Tambaboyo, Kabupaten Tuban). *Publika*, 4(7). <Https://Doi.Org//10.26740/Publika.V4n7.P%25p>

Zahra, L., Ghazali, F., Dermawan, A., Salsabila, C., Aulia, M., Made, N., & Melliana, M. (2022). Karakteristik Intrusi Air Laut Serta Hubungannya Dengan Ketinggian Dan Kemiringan Lereng. *Jurnal Geologi Kelautan*, 20(2).